

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membuat masyarakat di sebuah negara bisa menerima informasi dari manapun dengan cepat. Peristiwa dari belahan dunia lain bisa diterima dalam sekejap mata dan masyarakat bisa memberikan respon atas peristiwa tersebut. Kemampuan masyarakat untuk bisa menerima informasi dari manapun dengan cepat membuat batas negara menjadi kabur yang kemudian memunculkan fenomena penyebaran ideologi transnasional. Ideologi transnasional, atau yang biasa disebut sebagai transnasionalisme, memiliki kaitan yang erat dengan kapitalisme, dimana para penganut ideologi ini berusaha untuk mendorong individu, kelompok dan lembaga negara untuk menciptakan hubungan-hubungan yang bersifat lintas negara. Hubungan lintas negara yang diciptakan tidak hanya berupa hubungan dari segi ekonomi saja, melainkan juga hubungan dari segi sosial dan politik.

Penyebaran ideologi transnasional merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Munculnya ideologi transnasional merupakan konsekuensi dari adanya perkembangan IPTEK dan globalisasi, yang membuat batas-batas antarnegara menjadi bias atau kabur. Bagi masyarakat Indonesia, merupakan sebuah tantangan untuk bisa memfilter atau memilah ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia, karena tidak semua ideologi transnasional sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Oleh beberapa kalangan, ideologi transnasional merupakan ancaman tersendiri bagi Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

(Basarah: Ideologi Transnasional Ancam Pola Pikir Generasi Muda, 2018). Banyak generasi muda yang mulai terpengaruh akan ideologi-ideologi transnasionalisme seperti konsumerisme dan hedonisme yang menjadi budaya-budaya kapitalis, individualisme, liberalisme dan fundamentalisme agama.

Liberalisme berkembang pada masyarakat Barat di abad 18-19, dimana pandangan atau ideologi ini menekankan kepada kebebasan individu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan melalui perubahan dan inovasi organisasi sosial (Nugroho, 2000). Liberalisme memiliki kaitan yang erat dengan kapitalisme dan individualisme karena kedua pandangan tersebut (kapitalisme dan individualisme) merupakan pengembangan lebih lanjut dari liberalisme. Masuknya liberalisme dan budaya-budaya kapitalis ke Indonesia ditunjukkan dengan adanya perkembangan mekanisme pasar dan pembangunan di Indonesia yang lebih berpihak kepada pihak pemodal atau investor sehingga menyebabkan masyarakat sering diabaikan. Hal ini bisa dilihat dari dihapusnya AMDAL dan IMB dalam rangka mempermudah proses perizinan untuk investasi (IMB dan Amdal Akan dihapus dari Syarat Perizinan Investasi, 2019), beberapa proyek pembangunan pemerintah yang sering menindas rakyat. Contohnya adalah pembangunan kampus UIII (Setiawan, 2019) dan penggusuran Tamansari, Bandung (Lazuardi, 2019).

Selain itu contoh lain dari paham liberalisme yang mulai masuk ke dalam masyarakat Indonesia adalah merebaknya *fintech* yang menyebabkan maraknya penipuan berbasis pinjaman online (Banjarnahor, 2019), mudahnya masyarakat membeli sesuatu hanya untuk sekedar gengsi atau status sosial (Raharjo, 2019) seperti belanja barang-barang mewah (Sutianto, 2019). Fundamentalisme agama

sendiri juga menjadi fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia mengingat banyaknya aksi-aksi intoleran yang terjadi belakangan ini seperti pembubaran kegiatan keagamaan dan penyegelan rumah ibadah (Rachmawati, 2019) (Wijaya, 2019) (Wahyudi, 2015). Survei yang dilakukan oleh lembaga PPIM UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2017 menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap intoleransi dan radikalisme yang cukup tinggi (Saputra, 2018).

Penanaman serta penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan kepada masyarakat khususnya kepada siswa SMA sebagai generasi muda Indonesia. Pengajaran Pancasila, terutama kepada generasi muda, menjadi hal yang harus dilakukan mengingat arus globalisasi dan gempuran ideologi transnasional yang bisa mengikis karakter dan jatidiri bangsa Indonesia. Diharapkan dengan adanya pengajaran Pancasila kepada generasi muda menguatkan karakter dan jatidiri manusia Indonesia yang sesuai dengan Pancasila serta menjadi filter bagi generasi muda untuk memilah ideologi-ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia. Pengajaran Pancasila dalam lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh semua guru, bukan hanya guru PPKn dan guru Agama sebagaimana pandangan beberapa pihak saat ini. Pancasila harus diajarkan oleh guru dalam setiap proses pembelajaran baik itu dikaitkan materi pelajaran maupun dengan mencontohkan secara langsung kepada siswa melalui sikap dan tindakan guru dalam menjalankan aktivitasnya di lingkungan sekolah. Semua guru mata pelajaran tanpa terkecuali harus ikut serta mengambil peran dalam menanamkan serta menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada siswa untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya tahu apa itu Pancasila, namun juga bisa mengaplikasikan Pancasila

dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang pekerjaan atau peran mereka dalam masyarakat nantinya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari masalah ini dengan judul Penguatan Nilai-nilai Pancasila pada Siswa SMA (Studi Kualitatif di SMA Negeri 16 Jakarta).

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana guru mata pelajaran melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal yang nantinya akan dilihat adalah strategi guru mata pelajaran dalam melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila serta pertimbangan yang dipakai guru mata pelajaran ketika melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila. Penguatan nilai-nilai Pancasila kepada siswa bisa dilihat melalui proses pembelajaran yang dilakukan langsung oleh guru mata pelajaran di dalam kelas. Guru yang akan dijadikan objek penelitian adalah semua guru mata pelajaran kelas XI kecuali guru mata pelajaran PPKn dan guru Agama kelas XI. Wawancara dengan semua guru mata pelajaran kelas XI kecuali guru PPKn kelas XI dilakukan karena sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional bahwa semua guru wajib untuk melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa melalui *direct teaching* dan *indirect teaching* bagi guru PPKn dan guru agama dan *indirect teaching* bagi guru non-PPKn dan agama.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penguatan nilai-nilai Pancasila terjadi dalam mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS)?
2. Apa yang menjadi perbedaan antara penguatan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh guru PPKn dengan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS)?
3. Bagaimana cara guru mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS) dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa SMA?
4. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan guru mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS) dalam memilih cara untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila pada siswa SMA?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan mafaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk melihat cara/strategi yang diterapkan oleh guru mata pelajaran dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa SMA.

- b. Untuk mengetahui ragam cara/strategi yang dipakai oleh guru mata pelajaran dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila pada diri siswa SMA.
- c. Untuk mengetahui proses penguatan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh guru mata pelajaran dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila selama proses pembelajaran berlangsung.
- d. Untuk memperkaya khazanah ilmu Pancasila dan Kewarganegaraan terutama dalam bidang *civic education*.

Sementara itu, manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah, terutama yang terkait dengan bidang pendidikan seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di level pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan di level pemerintah kota/kabupaten dalam mengadakan pelatihan bagi guru terutama yang terkait dengan penguatan nilai-nilai Pancasila.
- b. Sebagai masukan untuk lembaga pemerintah terkait dan pihak sekolah untuk lebih gencar dalam mengadakan program pendidikan untuk menanamkan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila bagi siswa.